

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR APBD TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN dan KOTA se-JAWA TIMUR

Muhammad Yasin¹, Slamet Riyadi², Ibrahim Ingga³

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya¹

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya^{2,3}

slametriyadi10@untag-sby.ac.id², ibrahimingga@untag-sby.ac.id³

Abstract

Economic growth is a process of changing a country's economic conditions on a sustainable basis to a better state for a certain period. Economic growth can be interpreted also as a process of increasing the production capacity of an economy which is realized in the form of an increase in national income. Variable Free PAD (X1) Measured using: (1) Taxes, (2) Non taxes, Balancing Funds (X2) Measured using: (1) Tax Sharing, (2) General Allocation Funds, (3) Special Allocation Funds. Routine expenditure (X3) Measured using: (1) Direct, (2) Indirect. Development spending (X4) Measured using: (1) Development, (2) Growth. Independent variables Economic growth Measured using: (1) Ratio of growth, (2) GDP constant, (3) Non-constant GDP. Variable Moderator relationship between independent variables with dependent Local financial performance Measured using: (1) Ratio of efficiency, (2) Effectiveness ratio, (3) Ratio of independence, (4) Activity ratio. economic growth with this means that if the regional income it will cause an increase also on the achievement of economic growth. which is very flexible in terms of its utilization causes the region more flexibility in planning budget allocation for development activities in accordance with its economic agenda which among others in the form of development of basic facilities and infrastructure that play a role in supporting optimal economic growth.

Keywords: PAD, Balancing Fund, Routine Expenditure, Development Expenditure, Financial Performance, Economic Growth

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Priyo Hari Adi (2006) pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi daya tarik bagi para investor.

Pada rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai

dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun anggaran belanja fiskal Jawa Timur Tahun 2016 sebesar Rp148,30 triliun, dengan pangsa terbesar pada belanja APBD kabupaten/kota yang mencapai Rp83,78 triliun. Demikian pula anggaran pendapatan sebesar Rp109,53 triliun, sebagian besar juga ditopang oleh APBD kabupaten/kota dengan nilai mencapai Rp85,16 triliun. Untuk Total anggaran belanja fiskal Jawa Timur tahun 2016 mencapai Rp148,30 triliun, meliputi belanja APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp24,75 triliun (pangsa 16,69%), belanja APBD kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp83,78 triliun (pangsa 56,49%) dan belanja APBN sebesar Rp39,77 triliun (pangsa 26,82%). Secara spasial, anggaran belanja APBD kabupaten/kota tertinggi diraup oleh Kota Surabaya yang mencapai Rp7,94 triliun dan terendah Kota Blitar yaitu sebesar Rp847 miliar. Sampai dengan triwulan II 2016, realisasi belanja untuk ketiga anggaran belanja tersebut relatif baik. Realisasi anggaran belanja APBD Provinsi Jawa Timur mencapai 21,35% dengan realisasi terbesar pada belanja operasi (22,22%). Anggaran belanja APBD kabupaten/kota terealisasi sebesar 33,90%, sedangkan belanja APBN terealisasi sebesar 38,56%. Kota Blitar menjadi Kabupaten/Kota dengan realisasi belanja terbesar di triwulan ini, yaitu 42,05% seiring dengan tingginya realisasi belanja operasi yang mencapai 45,14%. Sementara itu, realisasi terendah terjadi di Kota Mojokerto yaitu sebesar 7,59% karena terbatasnya realisasi belanja modal. Analisis rasio keuangan pada APBD dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, atau dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu

dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Widodo dalam Halim, 2012).

Dari sisi pendapatan, total anggaran pendapatan tahun 2016 sebesar Rp109,53 triliun, terdiri dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp24,37 triliun (share 22,25%) dan APBD kabupaten/kota sebesar Rp85,16 triliun (share 77,75%). Realisasi penerimaan APBD Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan II 2016 mencapai 26,29%, didorong oleh pendapatan transfer dan PAD. Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota sebesar 46,69% sejalan dengan tingginya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer yang masing-masing mencapai 49,27% dan 46,22%. Anggaran pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 meningkat 9,54% didorong oleh pendapatan transfer. Sementara itu, anggaran belanja meningkat 1,62% didorong oleh belanja operasi dan belanja tak terduga. Anggaran pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sebesar Rp24,37 triliun, meningkat 9,54% dibandingkan tahun 2015. Sementara anggaran belanja dan transfer sebesar Rp24,75 triliun atau meningkat 1,62%. Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Timur Peningkatan terbesar anggaran pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 terutama bersumber dari pendapatan transfer yang naik 24,48% (Rp1,78 triliun), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang biasanya menjadi pendorong utama pertumbuhan, pada tahun 2016 hanya tumbuh 2,32% (naik Rp345 miliar).

Tabel 1. 1 Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2015 dan 2016

| Uraian | APBD Provinsi Jawa Timur | | % Peruba |
|---|--------------------------|-----------------------|------------|
| | Th. 2015 (Juta Rp) | Th. 2016 (Juta Rp) | |
| PENDAPATAN DAERAH | 22,246,181 | 24,368,078 | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 14,900,073 | 15,245,242 | |
| PAJAK DAERAH | 12,329,300 | 12,579,000 | |
| RETRIBUSI DAERAH | 152,223 | 111,423 | (26 |
| HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 351,542 | 365,629 | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 2,067,009 | 2,189,190 | |
| PENDAPATAN TRANSFER | 7,299,785 | 9,086,542 | 2 |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | 3,598,308 | 9,052,654 | 15 |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | 3,701,477 | 33,888 | (96 |
| TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA | - | - | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 46,322 | 36,294 | (21 |
| PENDAPATAN HIBAH | 46,322 | 36,294 | (21 |
| PENDAPATAN DANA DARURAT | - | - | |
| PENDAPATAN LAINNYA | - | - | |

Sumber: BPKAD Jawa Timur

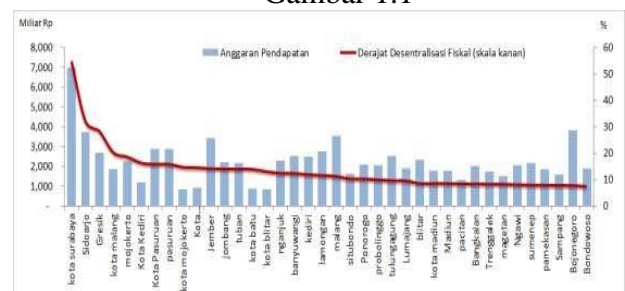
Rasio derajat otonomi fiskal (DOF) Provinsi Jawa Timur masih dalam kategori baik, tercermin dari 62,56% anggaran pendapatan merupakan PAD. Pajak daerah masih menjadi komponen terbesar PAD (pangsa 82,51% dari total PAD), namun pertumbuhannya melambat menjadi 2,03% setelah di tahun 2015 tumbuh 18,35%. Penurunan target pendapatan pajak antaralain diimplementasikan pada target pajak BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) dan PBBKB (pajak bahan bakar kendaraan bermotor). Penurunan target pendapatan pajak daerah tersebut diindikasikan sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 27,77%, lebih tinggi dari triwulan II 2015 yang sebesar 26,86%, didorong oleh pajak daerah yang pada triwulan ini terealisasi 27,82%, lebih tinggi dari periode yang sama di tahun sebelumnya (24,55%). Tingginya realisasi penerimaan pajak daerah sejalan dengan upaya Pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan wajib pajak serta upaya penegakan hukum terkait perpajakan. Disamping itu, perekonomian Jawa Timur yang mulai terakselerasi di triwulan II 2016 ini turut memberikan dampak positif pada

penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak daerah juga tercermin dari peningkatan penjualan mobil pribadi di Jawa Timur yang tumbuh 5,7% pada triwulan ini. Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri dari anggaran belanja dan anggaran transfer. Pada anggaran perubahan tahun 2016, keduanya mencapai Rp24,75 triliun atau naik 1,62% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp24,36 triliun. Peningkatan terjadi pada anggaran belanja operasi, sedangkan anggaran belanja modal dan transfer menurun. Anggaran belanja operasi sebesar Rp15,53 triliun atau meningkat 12,96% dibandingkan tahun 2015, dengan kenaikan terbesar pada belanja pegawai (30,95%), disusul oleh belanja hibah (25,41%) dan belanja bantuan sosial (12,59%).

Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota dari total anggaran pendapatan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang mencapai Rp85,2 triliun, anggaran terbesar berada di Kota Surabaya (Rp6,98 triliun dengan share 8,19%) sedangkan yang terkecil di Kota Mojokerto (Rp832 miliar dengan share 0,98%). APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur Secara kumulatif, sumber pendapatan terbesar anggaran pendapatan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur adalah pendapatan transfer, yang mencapai 79,67% dari total anggaran. Tingginya komposisi pendapatan transfer menunjukkan ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

Gambar 1.1



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Gambar 1. 9 Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Jawa Timur, 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah hanya mencapai 16,34%. Secara spasial, rasio desentralisasi fiskal tertinggi berada di Kota Surabaya yang mencapai 55,02% dan terendah di Kabupaten Bondowoso (7,31%). Tingginya aktivitas ekonomi Kota Surabaya yang merupakan hub dengan Kawasan Indonesia Timur diindikasikan mendorong tingginya PAD. Sementara rendahnya desentralisasi fiskal Kabupaten Bondowoso karena rendahnya komponen pajak daerah terhadap PAD yang hanya mencapai 15,69%.

LANDASAN TEORI

Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Hasil Analisis Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 memiliki total pendapatan Rp5,950,572,000, hal ini terdiri dari PAD yang cukup dominan yaitu Rp 3,886,986,000 dan tingkat DAU Rp 1,118,478,000 dan DAK Rp 18,001,000. selain itu masih ada lagi pendapatan dari Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 733,154 jika ditotal maka dana perimbangan berjumlah Rp 1,869,633,000. pendapatan terbesar tetap berasal dari pajak daerah yang berjumlah Rp 3,267,125,000, dengan selisih antara PAD dan DAU ini dapat disimpulkan Jawa Timur tidak terlalu tergantung dari dana

perimbangan. namun dengan belanja tidak langsung yang berjumlah Rp3,843,103,000 sehingga mengakibatkan perbandingan defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp -363,484,000. pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp5,950,572,000 dan belanja sejumlah Rp 6,314,056,000. Dari Provinsi Jawa Timur, daerah (kota maupun kabupaten) yang memiliki PAD terbesar adalah Kota Surabaya dengan PAD Rp 864,083,000 dan berpendapatan total sebesar Rp 2,599,946,000 namun pendapatan total ternyata lebih kecil dibandingkan belanja langsung, bahkan Kota Surabaya mengalami defisit sebesar Rp -1,429,910,000. Dana Perimbangan sebesar Rp 1,459,643,000 ternyata masih belum mampu memenuhi belanja langsung Kota Surabaya. namun dengan tingginya selisih antara PAD dan dana perimbangan mengindikasikan Surabaya masih bergantung pada dana bantuan. dengan jumlah defisit tersebut menempatkan Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki defisit terbanyak. Sedangkan yang memiliki PAD terendah di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Ngawi dengan PAD yang hanya menyumbang Rp 19,233,000, namun dengan dana perimbangan sejumlah Rp 673,174,000 sehingga mempengaruhi pendapatan total sejumlah Rp 715,953,000, mampu membuat kondisi yang stabil bagi Kabupaten Ngawi, yaitu terjadinya tingkat surplus sejumlah Rp 1,408,000. hal ini ditenggarai oleh jumlah belanja langsung yang hanya berjumlah Rp 232,365,000 dan belanja tidak langsung Rp 482,180,000. Struktur APBD ini terdiri Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan yang dijelaskan dibawah ini:

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo dalam Fisanti (2013), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya di dukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.

Menurut Lewis dalam Ahyani (2010) Tidak efektifnya berbagai peraturan yang dilakukan pemerintah bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan publik. Perlu adanya kebijakan peraturan daerah yang tepat untuk melakukan pungutan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. PAD sebagai sumber utama penghasilan bagi daerah.

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi". Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. (Shofia Azahra) Dana perimbangan terdiri dari :

1).Dana Bagi Hasil

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) "Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

2).Dana Alokasi Umum

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi" Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Sony Yuwono, Dwi Cahyono Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R (2008) Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Sedangkan H.A.W Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.

3).Dana Alokasi Khusus

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) "Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional". Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam,

deffersial potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa disebut *fiscal gap* (celah fiskal).

Belanja rutin

Menurut Mardiasmo (2009:66) mengemukakan belanja pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi dua jenis yaitu belanja rutin dan belanja modal. Belanja rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan aktivitas pemerintah sehari-hari pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran rutin adalah belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga, cicilan utang dan lain-lain. Pengeluaran rutin pemerintah memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

Belanja pembangunan

Menurut Mardiasmo (2009:66) mengemukakan belanja pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi dua jenis yaitu belanja rutin dan belanja modal. belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya.

ichwan (1997 : 27) mendefinisikan belanja pembangunan sebagai berikut: “Belanja Pembangunan adalah pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang

non konsumtif, berbentuk investasi (proyek–proyek) baik berbentuk proyek fisik maupun non fisik”. Sedangkan menurut Baswir (1997 : 45) Belanja Pembangunan adalah: sebagai pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi, dan diajukan untuk melaksanakan tugas–tugas pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja pembangunan adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Manajemen keuangan daerah

Manajemen keuangan daerah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban daerah penyelenggaraan pemerintah yang ada yang segalanya dinilai dengan uang, dan masuk dalam kekayaan yang berhubungan dengan hak serta kewajiban daerah dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan salah satu petugas keuangan pemerintah daerah oleh sebab itu DPRD harus melakukan pengawasan serta pengendalian agar semua tujuan tersebut tercapai, mereka harus berusaha agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Drs. Tjahja Supriatna, definisi keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk

mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (PBD). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

Tujuan Pengelolaan Keuangan

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab
2. Memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna dan daya guna
5. Pengendalian
 - diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

Unsur Utama Pengelolaan Keuangan

Unsur-unsur sistem keuangan pemerintah daerah dapat digolongkan kedalam dua kelompok yaitu :

1. Unsur berkala dan usur hukum
2. Unsur-unsur luar dan dalam

Pengelola Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berikut ini adalah uraian tentang tugas-tugas para pejabat pengelola keuangan daerah tersebut.

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Isu Pengelolaan Keuangan Daerah

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan pada prinsipnya dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan (vide Psl 6 UU 17/2003). Kekuasaan tersebut, kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang dipimpinya. Untuk daerah, kekuasaan tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Isu Pengelolaan Aset Daerah

Aset merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kinerja keuangan daerah

Pengertian Kinerja Pengertian kinerja seperti yang dikemukakan oleh Bastian (2001: 329) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Potensi tumbuhnya perekonomian Jawa Timur pada tahun 2016 mendatang diprediksi berada pada kisaran 5,8% hingga 6,2%, atau lebih tinggi 0,5% sampai 1% dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa

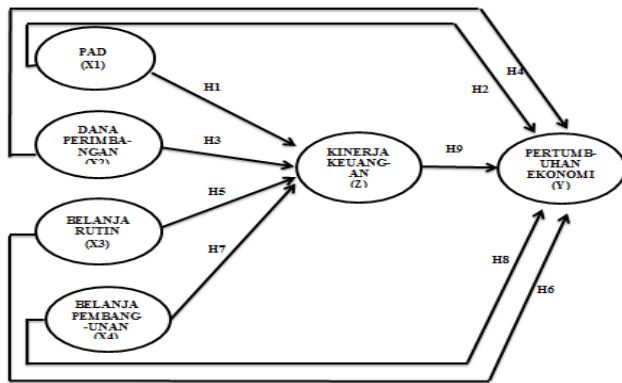
Timur selalu menorehkan pertumbuhan yang lebih besar ketimbang dengan capaian nasional. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rudi Purwono mengatakan pemerintah telah membidik pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 mendatang pada kisaran 5,3% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. Sementara Bank Indonesia merumuskan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,2% hingga 5,5%. “Mengacu pada pengalaman yang sudah-sudah dan beberapa indikator pembangkit ekonomi di Jawa Timur, provinsi ini pertumbuhan ekonominya jika dirumuskan bisa tembus di kisaran 5,8% hingga 6,3%.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Kerangka Konseptual

Pada bab ini akan dijelaskan kerangka konsep penelitian, hipotesis penelitian dan definisi operasional. Kerangka konsep penelitian akan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan dengan teori. Dengan demikian kerangka konsep diperlukan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan suatu penelitian yang dikembangkan dari tinjauan teori sehingga mudah dipahami. Gambaran mengenai variabel penelitian dapat diperoleh melalui kerangka konsep, yang dikategorikan kedalam kelompok *independent*, *dependent*, dan *confounding*. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan sementara peneliti yang akan diuji kebenarannya yang dinyatakan dalam hipotesis alternatif, sebagai suatu petunjuk dalam mengidentifikasi dan menginterpretasikan suatu hasil. Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari variabel yang diteliti untuk memperjelas maksud dari penelitian yang dilakukan.

Gambar Kerangka Konseptual



PEMBAHASAN Oleh Peneliti

Data Penelitian

A. Data daerah penelitian

Tabel

Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tmur

| Kabupaten | | Kabupaten | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Pacitan | 21. | Ngawi |
| 2. | Ponorogo | 22. | Bojonegoro |
| 3. | Trenggalek | 23. | Tuban |
| 4. | Tulungagung | 24. | Lamongan |
| 5. | Blitar | 25. | Gresik |
| 6. | Kediri | 26. | Bangkalan |
| 7. | Malang | 27. | Sampang |
| 8. | Lumajang | 28. | Pamekasan |
| 9. | Jember | 29. | Sumenep |
| 10. | Banyuwangi | Kota | |
| 11. | Bondowoso | 1. | Kediri |
| 12. | Situbondo | 2. | Blitar |
| 13. | Probolinggo | 3. | Malang |
| 14. | Pasuruan | 4. | Probolinggo |
| 15. | Sidoarjo | 5. | Pasuruan |
| 16. | Mojokerto | 6. | Mojokerto |
| 17. | Jombang | 7. | Madiun |
| 18. | Nganjuk | 8. | Surabaya |
| 19. | Madiun | 9. | Batu |
| 20. | Magetan | | |

Tabel diatas menjelaskan tentang kabupaten dan kota di Jawa Timur dimana terdapat di 29 kabupaten dan 9 kota sehingga dapat deskripsikan pada table yang sudah dikelompokkan setiap variabelnya :

Analisis dan Hasil Penelitian

Uji Statistik

Untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan melihat signifikansi pengaruh antar variable dengan melihat koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistic. Pada PLS hal tersebut dilakukan dengan melihat *Algorithm Bootstrapping report*, berikut hasilnya :

Tabel
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values, P-Values)

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistics (O/STDEV) | P Values | Hipotesis |
|--|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| PAD -> Kinerja Keuangan | -0.392 | -0.394 | 0.225 | 1.747 | 0.081 | Td k.Sig |
| PAD -> Pertumbuhan Ekonomi | 0.115 | 0.361 | 0.160 | 2.245 | 0.025 | Sig |
| Dana Perimbangan -> Kinerja Keuangan | -0.125 | -0.048 | 0.359 | 2.418 | 0.017 | Sig |
| Dana Perimbangan -> Pertumbuhan Ekonomi | 0.028 | 0.051 | 0.197 | 0.285 | 0.776 | Td k.Sig |
| Belanja Rutin -> Kinerja Keuangan | 0.008 | 0.026 | 0.187 | 2.663 | 0.058 | Sig |
| Belanja Rutin -> Pertumbuhan Ekonomi | 0.351 | 0.333 | 0.247 | 1.528 | 0.128 | Td k.Sig |
| Belanja Pembangunan -> Kinerja Keuangan | -0.078 | -0.049 | 0.218 | 0.729 | 0.878 | Td k.Sig |
| Belanja Pembangunan -> Pertumbuhan Ekonomi | 0.115 | 0.103 | 0.210 | 2.597 | 0.047 | sig |
| Kinerja Keuangan -> Pertumbuhan Ekonomi | -0.169 | -0.165 | 0.192 | 2.779 | 0.007 | Sig |

Diolah oleh peneliti

Path Coefficient menunjukkan tingkat signifikansi dan hubungan antar variabel. Dengan demikian memberikan hasil sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah di kabupaten dan kota se-jawa timur adalah Tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 1.747 (<1,96). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.392 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD

terhadap Kinerja Keuangan daerah adalah negatif.

Dapat diartikan Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh beberapa Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo dalam Fisanti (2013) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber yang terlihat bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di Kabupaten Kota tidak berjalan secara maksimal. Menurut Lewis dalam Ahyani (2010) Tidak efektifnya berbagai peraturan yang dilakukan pemerintah bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan publik. Selain itu pembebanan biaya atas barang maupun jasa yang ditawarkan yang harus ditanggung oleh perusahaan daerah turut serta mengurangi output yang dihasilkan. Dengan kurang maksimalnya PDRB yang dihasilkan suatu daerah tentu akan mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. karena tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak terlepas dari tingkat kenaikan PDRB daerah tersebut. Jadi sangat penting untuk pemerintah daerah memaksimalkan sektor pendapatannya agar mendapat output yang maksimal di setiap sektornya.

H2 : Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 2.245 ($<1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0.115 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap Pertumbuhan ekonomi adalah positif.

artinya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten/kota DIY sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Suprianto (2013), yang menemukan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Dengan pemahaman bahwa kinerja keuangan menunjukkan kemampuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan semakin bertambahnya Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi pada Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menekankan hasil PAD yang

berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk Penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang.

H3 : Terdapat pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

Dana perimbangan terhadap Kinerja keuangan adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.418 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.125 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara dana perimbangan terhadap Kinerja keuangan adalah positif.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun.

H4 : Terdapat pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

Dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak

signifikan dengan t-statistik sebesar 0.285 ($<1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0.028 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (melalui bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak Provinsi) sebagian besar berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (pertumbuhan ekonomi). Hal ini memberikan implikasi bahwa Dana perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Pajak Provinsi telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota, atau dapat pula berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten dan Kota selama ini banyak ditentukan oleh Dana Perimbangan. dan sektor-sektor tersebut dapat memberikan kontribusi pada berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang bersifat langsung maupun bersifat stimulan terhadap pengembangan beberapa aktivitas ekonomi. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan kemampuan masyarakat melalui pembinaan dan peningkatan produksi serta peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka pelayanan teknis, sehingga secara akumulasi memberi penguatan kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator peningkatan kemampuan masyarakat dan dapat memberi efek terhadap peningkatan kemampuan pada setiap daerah di Jawa Timur.

H5 : Terdapat pengaruh signifikan belanja rutin terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

Belanja Rutin terhadap Kinerja Keuangan adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.663 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0.008 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja rutin terhadap Kinerja keuangan adalah positif.

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Belanja rutin berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa kenyataan Pemerintah Daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja rutin, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan.

H6 : Terdapat pengaruh signifikan belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

Belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 1.528 ($<1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0.351 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negative.

Bahwa pengeluaran rutin pemerintah yang bernilai negatif menunjukkan apabila pengeluaran rutin pemerintah meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengeluaran rutin pemerintah lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti pengeluaran untuk pembayaran cicilan dan bunga utang. Dengan meningkatnya pembayaran cicilan dan bunga utang menyebabkan dana yang semula dianggarkan untuk keperluan investasi domestik digunakan untuk menutupinya, sehingga investasi domestik menurun. Penurunan investasi tersebut pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kweka dan Morrissey (2000), investasi publik (pengeluaran pembangunan pemerintah) dapat tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini diindikasikan bahwa penyebab tidak signifikannya pengeluaran pembangunan adalah karena terjadi kebocoran dalam APBN, khususnya dalam pembiayaan pembangunan, sehingga mengakibatkan pengeluaran pembangunan yang dilakukan tidak sebesar nilai dana yang dianggarkan untuk realisasi pembangunan.

H7 : Terdapat pengaruh signifikan belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

Belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 0.729 ($<1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.078 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja pembangunan terhadap Kinerja keuangan adalah negatif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugiono (2014) yang menemukan ada pengaruh positif signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah yang dananya dapat berasal dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi pendapatan asli daerah lebih besar dari pada kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang dialokasikan untuk belanja daerah yang salah satunya untuk belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Darsono (2013) yang menemukan ada pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan rasio kemandirian namun tidak signifikan. Bertentangan juga dengan penelitian Imawan dan Wahyudin (2014) serta Darwis (2015) yang menemukan belanja modal berpengaruh dengan arah negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mengoptimalkan belanja modal untuk meningkatkan kemandirian daerah serta proporsi belanja modal yang menyentuh langsung kepada publik belum mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah.

H8 : Terdapat pengaruh signifikan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

Belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.759 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar 0.115 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara

belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif.

Hubungan positif dan signifikan variabel belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Adi (2006) bahwa bagian dari belanja langsung, yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain jika pengeluaran pembangunan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan begitu sebaliknya. Refleksi trend PDRB mendeskripsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipacu oleh tinggi rendahnya barang dan jasa yang dihasilkan, dimana untuk memaksimalkan produktivitas barang dan jasa diperlukan anggaran belanja langsung yang besar. Bose and Osborn (2007), menyatakan bahwa belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dalam penelitian tersebut diprosikan melalui GDP. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh Chude and Chude (2013) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan bahwa tingginya realisasi belanja langsung merupakan indikator penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi

H9 : Terdapat pengaruh signifikan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur

Kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.779 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.169 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara

kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif.

bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan memiliki peran penting dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah setelah otonomi memiliki wewenang mengelola dana yang cukup besar dan apabila tidak dibarengi dengan kinerja keuangan atau efisiensi anggaran maka dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan prioritas pembangunan di daerahnya dan cenderung mengalami pemborosan anggaran. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahunnya terus meningkatkan efisiensi anggarannya dengan mengeluarkan kebijakan maupun program dengan prinsip pemerintahan *good governance*, transparan dan akuntabilitas seperti mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik, regulasi tentang perjalanan dinas luar daerah yang terus diperbaharui, pelelangan barang dan jasa secara elektronik, transparansi anggaran lewat media elektronik, pengawasan dan audit keuangan yang semakin ketat dan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga pengeluaran pembangunan yang bersumber dari komponen APBD dapat mendorong laju perekonomian.

Simpulan

Penelitian ini menguji “Analisis struktur APBD terhadap kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur”. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa:

1. PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah di kabupaten dan kota se-jawa timur adalah Tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 1.747 (<1,96). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.392 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap Kinerja Keuangan daerah adalah negatif.
2. PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 2.245 (<1,96). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0.115 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PAD terhadap Pertumbuhan ekonomi adalah positif.
3. Dana perimbangan terhadap Kinerja keuangan adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.418 (>1,96). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.125 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara dana perimbangan terhadap Kinerja keuangan adalah positif.
4. Dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 0.285 (<1,96). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0.028 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif.
5. Belanja Rutin terhadap Kinerja Keuangan adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.663 (>1,96). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0.008 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja rutin terhadap Kinerja keuangan adalah positif.
6. Belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 1.528 (<1,96). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0.351 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negative.
7. Belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan adalah tidak signifikan dengan t-statistik sebesar 0.729 (<1,96). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -

- 0.078 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja pembangunan terhadap Kinerja keuangan adalah negatif.
8. Belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.759 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar 0.115 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif.
 9. Kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.779 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0.169 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif.

Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana meningkatkan kinerja keuangan Daerah sehingga dapat diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan daerah berupa, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK untuk mengalokasi anggaran ke Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan supaya pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur bisa sejahtera.
2. Kinerja Keuangan yang ada di setiap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur untuk tetap dipantau oleh Kepala Daerah supaya bisa di maksimalkan keuangan tersebut dalam Pertumbuhan

Ekonomi di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

3. Diharapkan penelitian selanjutnya, studi atau kajian yang akan dilakukan sebaiknya mencakup variabel lain untuk dikembangkan.
4. Penambahan variabel baru sebagai variabel independen, variabel dependen maupun variabel moderat sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali", Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya, hal. 1140.
- Abdul Halim.2008. Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). UUP STIM
- Adi Priyo Hari, 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali", Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Adi, Priyo Hari. 2007. "Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi". The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ahyani, Wahid. 2010. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan

- Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dan Pengganguran Pasca Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah). Skripsi, Tidak Dipublikasikan. Universitas Brawijaya
- Ardito Bhinadi, 2003 . Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa Ekonomi Pembangunan. Vol 8. No 1. Juni 2003. Hlm : 39-48
- Arsyad, L. (1999) Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Ayers, Denny, Patzer, Andrew, Halberstandt, Ari, 1999, Professional Java Server Programming, Wrox Press Ltd, Birmingham B27 6BH, USA.
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- BPS, Statistik Jawa Timur dalam Angka, Surabaya: Jawa Timur, Badan Pusat Statistik.
- Bose, N., Haque, M. E., & Osborn, D. R. (2007). Public Expenditure and Economic Growth: A dsaggregated Analysis for Developing Countries. The Manchester School.
- Chude & Chude. (2013). Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria. International Journal of Business and Management Review, Vol.1 No.4: 64- 71.
- Darmawi, Herman. 2005. Manajemen Risiko. Bumi Aksara, Jakarta
- Darsono dan Ashari. 2010. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan (Tips Bagi Investor, Direksi, dan Pemegang Saham). Penerbit Andi. Yogyakarta. Ghozali, I. 2007.
- Darwis, E.T.R. 2015. “Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan
- Harianto, David dan Priyo Hadi Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Perkapita. SNA X.
- H.A.W.Wijaya. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Imam Ghozali. 2014. Partial least squares konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Porgram Warp PLS 4.0, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jaya, W.K., 1996, “Analisis Keuangan Daerah; Pendekatan Makro”, Model Program PMSES, Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta
- Kawedar, warsito dkk, 2008. Akuntansi Sektor Publik, Semarang UNDIP
- Maharani, Astri Dhiah, Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Bank Mega Syariah Cabang Semarang, Semarang:

- Universitas Diponegoro Semarang,
2010
- Fakultas Ekonomi Universitas
Diponegoro Semarang
- Mamesah DJ Sistem Administrasi
Keuangan Daerah Gramedia
Pustaka Utama Jakarta 1995
- Mardiasmo, 2002. "Otonomi Daerah
Sebagai Upaya Memperkokoh
Basis Perekonomian Daerah".
Makalah. Seminar Pendalaman
Ekonomi Rakyat.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan
Manajemen Keuangan Daerah. Andi.
Yogyakarta.
- Penyusunan dan penetapan APBN dan
APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003
Republik Indonesia Peraturan Pemerintah
Nomor 105 tahun 2000 tentang dana
perimbangan
Republik Indonesia Peraturan Pemerintah
Nomor 105 tahun 2000 tentang
pengelolaan dan pertanggung
jawaban keuangan daerah
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005.
Pemerintahan Daerah di Indonesia.
Bandung: CV Pustaka Setia
- Supriatna Tjahja. 2000. Strategi
Pembangunan dan Kemiskinan.
Rineke Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif Dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
- Supriatna Tjahja. 2000. Strategi
Pembangunan dan Kemiskinan. Rineke
Cipta. Jakarta.
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. "Analisis
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terhadap Kemandirian Daerah".
Tesis S2 Program Pasca Sarjana
- Todaro M.P. 2006. Pembangunan
Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit
Erlangga, Jakarta.
- Todaro. M.P., 2000. Pembangunan
Ekonomi di Dunia Ketiga
(H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh
ed.). Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004,
Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
- _____. 2004. Jurnal Ekonomi
Pembangunan. Vol. 5, No. 2,
Desember 2004, hal. 147-159.
- _____, 2004, Ekonomi
Pembangunan, Edisi Keempat,
Yogyakarta: STIE YKPN.
- _____, Statistik Propinsi Jawa
Timur dalam Angka, Surabaya:
Jawa Timur, Badan Pusat Statistik.
- _____. 2004. Jurnal Ekonomi
Pembangunan. Vol. 5, No. 2,
Desember 2004, hal. 147-159.
- _____, 2004, Ekonomi
Pembangunan, Edisi Keempat,
Yogyakarta: STIE YKPN.
- BPS, Statistik Jawa Timur dalam Angka,
Surabaya: Jawa Timur, Badan
Pusat Statistik.
- _____, Statistik Propinsi Jawa
Timur dalam Angka, Surabaya:
Jawa Timur, Badan Pusat Statistik.

<http://tesismanajemen.com/manajemen-keuangan-daerah>

(<http://chandraekapurwanto.blogspot.co.id/2013/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>)

(<https://www.scribd.com/doc/98370085/Analisis-Apbd-Provinsi-Jawa-Timur>)